

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia khususnya di bidang perdagangan internasional telah memasuki fase perkembangan perdagangan bebas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah *Free Trade Agreement* (FTA) baik secara multilateral, regional, maupun bilateral. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2009 telah terdapat 450 FTA yang telah dinotifikasi, sebagai contoh di Benua Amerika terdapat sebuah kerjasama NAFTA yaitu bentuk kerjasama regional antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di Benua Eropa terdapat kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan terbentuknya sebuah kawasan ekonomi yaitu *European Union* (EU), dan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) di kawasan Asia Tenggara.<sup>1</sup>

ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama regional merupakan sebuah bentuk kekuatan baru di Benua Asia, karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di Dunia. Hal ini tentunya menarik minat Negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerjasama mereka di wilayah Asia. Dengan terwujudnya bentuk kerjasama ASEAN+1, ASEAN+3, atau ASEAN+6, ditambah dengan rencana besar dengan terbentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) yang membawa kerjasama ekonomi ke arah yang lebih luas yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. Salah satu Negara besar yang menunjukkan komitmen kerjasamanya sebagai mitra ASEAN adalah

---

<sup>1</sup> Andri Gilang Nugraha, *Tantangan dan peluang serta langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap implementasi penuh ASEAN China free trade agreement (ACFTA)*, Buletin KPI edisi-02/KPI/2010

Republik Rakyat China (RRC), yang secara konkrit diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama perdagangan bebas antara ASEAN dengan RRC.<sup>2</sup>

*Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan Negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya.<sup>3</sup> Bergabung Brunei pada tahun 1980-an (dikenal sebagai ASEAN-6), dan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (dikenal sebagai CLMV) pada 1990-an. 10 anggota ASEAN ini memiliki ragam dalam ukuran, yakni tingkat perkembangan ekonomi, sumber daya abadi, dan kemampuan industri dan teknologi. Pada tahun 1992 ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan tarif diturunkan tingkat 0-5% pada tahun 2002.<sup>4</sup>

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada pemberlakuan penuh kesepakatan perdagangan bebas antar anggota ASEAN yang ternyata bertambah lagi satu Negara non-anggota, yaitu China. Dengan adanya hal tersebut liberalisme kini telah diterapkan oleh Negara-negara ASEAN bersama China,

---

<sup>2</sup> Winarno,Budi. 2009. *Pertarungan Negara VS Pasar*. Yogyakarta: Media Presindo

<sup>3</sup> [www.google.com/Wikipedia/ASEAN](http://www.google.com/Wikipedia/ASEAN)

<sup>4</sup> ASEAN-China: *Hubungan Ekonomi pada abad ke Dua Puluh Pertama*. Jakarta: sekretariat ASEAN.

yakni dua kawasan tersebut melakukan perdagangan bebas dengan membuat perjanjian yang disebut dengan Asean China Free Trade Area (ACFTA).<sup>5</sup>

*ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>6</sup>

Hubungan ASEAN dan China telah dimulai sejak *ASEAN Ministeril Meeting (AMM)* ke-24 pada Bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerjasama terjalin semakin erat sejak ditandatanganinya deklarasi bersama antar kepala Negara/ Pemerintah ASEAN dan China dalam kerjasama strategis untuk perdamaian dan kesejahteraan dalam acara *ASEAN China Summit* ke-7 pada Oktober 2003 di Bali, Indonesia.

Selanjutnya, dalam periode 2005-2010 disusun rencana aksi untuk menerapkan deklarasi bersama tersebut. Rencana aksi tersebut berisi *master plan* untuk memperluas dan memperdalam hubungan kerjasama ASEAN China dalam kerangka memperkuat kerjasama strategis untuk perdamaian, pembangunan dan kesejahteraan regional. ASEAN dan China telah sepakat dalam 11 hal area kerjasama yang menjadi prioritas, yaitu energi, transportasi, budaya, kesehatan

---

<sup>5</sup> Leni Dewi Anggraeni, *Dampak ACFTA terhadap Perekonomian*:  
<http://www.scribd.com/doc/25830743/dampak-ACFTA-terhadap-perekonomian-indonesia>

<sup>6</sup> MoU ASEAN-China Free Trade Area (doc pdf)

masyarakat, pariwisata, pertanian, teknologi informasi, investasi, SDM, pembangunan sungai Mekong dan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Negara-negara ASEAN sedang melihat kebangkitan China dengan rasa campuran, ancaman dan harapan. Pengertian ancaman ekonomi timbul dari ukuran tipis dan dinamisme perekonomian China yang berkembang dan berpotensi untuk “membanjiri pasar” dengan produk kompetitif. Kerjasama dengan China tidak dipungkiri merupakan potensi pengembangan pasar yang sangat besar bagi kurang lebih 1,3 Milyar penduduk China yang merupakan potensi *market* di negara dengan populasi terpadat di Dunia.

Zona perdagangan bebas ASEAN China atau *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) telah diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2010. ASEAN dan China menyetujui dibentuknya ACFTA melalui dua tahapan : (1) tahun 2010 dengan melibatkan 6 Negara ASEAN atau biasa disebut ASEAN-6, yang meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam; serta (2) tahun 2012 melibatkan 4 Negara meliputi Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.<sup>8</sup>

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive*

---

<sup>7</sup> Tantangan dan Peluang Penerapan ACFTA: *kajian ekonomi regional provinsi jawa tengah triwulan IV-2009*

<sup>8</sup> Pangestu, Mari (2004). “*Perkembangan Ekonomi China dan Tanggapan ASEAN*”. di Ryosei Kokubun

*Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002.

Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.<sup>9</sup>

Tujuan pembentukan ACFTA adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di kedua wilayah. Skema implikasi dari perdagangan bebas tersebut adalah pembebasan tarif bea masuk barang lintas Negara antara anggota ASEAN dan China secara bertahap.

Tahun 2010 Indonesia diwarnai situasi yang menegangkan dalam kiprah perdagangan. Pasca pemerintah meratifikasi ACFTA yang mulai berlaku implementatif sejak awal tahun 2010 lalu, barang-barang antar Negara China dan ASEAN akan saling bebas masuk dengan pembatasan tarif hingga Nol persen.

---

<sup>9</sup> MoU ASEAN-China Free Trade Area (doc pdf)

Sejumlah pengusaha menilai, sektor usaha kecil dan menengah akan tergilas karena serbuan barang-barang murah dari China. Dalam konteks ini, Indonesia tidak punya pilihan untuk menunda apalagi mundur.

Oleh karena itu, ACFTA ini menimbulkan polarisasi opini publik yang pecah dalam dua kubu yaitu pro dan kontra dalam menanggapi ratifikasi ACFTA oleh Pemerintah.<sup>10</sup> Kalangan yang kontra menilai bahwa kebijakan partisipasi Indonesia dalam ACFTA ini merupakan ajang bunuh diri, karena kapabilitas pasar domestik yang masih tertinggal jauh dibelakang China. Argumen yang diberikan rata-rata berkisar pada anggapan bahwa industri kita, terutama industri kecil dan menengah, belum siap dan tidak akan mampu bersaing dalam menghadapi derasnya arus masuk produk-produk China ke Indonesia, namun sebagian publik lain yang pro terhadap kebijakan ini berargumen bahwa sebenarnya kebijakan ini merupakan langkah strategis yang harus di dukung.

Dengan melihat dampak perdagangan bebas antara ASEAN dan China yang menyangkut industri Indonesia, tidak dapat dielakan Indonesia harus memperkuat daya saing guna menaikkan posisis tawar produk-produk lokal. Pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa sektor manufaktur yang bakal terkena dampak terparah. Untuk produk-produk primer, Indonesia cenderung kuat. Dalam usaha untuk memperkuat daya saing barang-barang Indonesia, perbaikan mutlak perlu dilakukan.<sup>11</sup>

Agar pemberlakuan perjanjian tersebut tidak sepenuhnya ancaman tetapi juga sebuah peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk

---

<sup>10</sup> Blogspot:<http://yennitrianihi.blogspot.com/2011/02/kebijakan-Indonesia-dalam-merespon.html>

<sup>11</sup> Media Indonesia, *perkuat daya saing, pengamanan pasar dalam negeri dan pencitraan produk Indonesia*: [http://www.sumbarprov.go.id/detail\\_artikel.php?id=225](http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=225)

mengupayakan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan kepada tiga hal terhadap implementasi penuh ACFTA,<sup>12</sup> yaitu: *Pertama*, Meningkatkan daya saing produk; *Kedua*, Pengamanan pasar dan pasar domestik; *Ketiga*, Mendorong penggunaan produk Indonesia di dalam Negeri.

Dari berbagai sektor yang terkena dampak dari ACFTA, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk UMKM disini, salah satunya adalah sektor industri rumahan (home industry) yaitu Bordir Tasikmalaya. Kesepakatan perdagangan bebas antara negara anggota ASEAN dan China menjadi ancaman yang serius bagi para pengusaha bordir. Meski kesepakatan sejenis telah berjalan dengan Jepang dan Korea, namun pesona China terlalu kuat untuk tidak menjadi perhatian utama. Bukan apa-apa, negara Tirai Bambu ini memang ciamik menjalankan strategi memperlebar pasar yang begitu ekspansif. Apalagi dengan iming-iming penawaran produk yang murah meriah. Didukung karakteristik konsumen di Indonesia yang senang-senang saja disuguhi berbagai barang semurah mungkin, membuat aliran produk China menjadi nyaris tanpa sumbat.

Ternyata terbukti, dampak pelaksanaan ACFTA yang sudah berjalan lebih dari setahun ini sangat besar buat industri lokal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghitung, nilai impor produk industri China di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding 2009. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke China di 2010 hanya naik 34% dibanding 2009 yang hanya

---

<sup>12</sup> Defitra, SE, *peningkatan Daya Saing, pengamanan pasar dalam negeri dan pencitraan produk Indonesia* : [http://www.sumbarprov.go.id/detail\\_artikel.php?id=225](http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=225)

sebesar US\$ 15,69 miliar. Itu berarti, perdagangan Indonesia- China pada tahun lalu mengalami defisit hampir US\$ 5 miliar.<sup>13</sup>

Sejatinya, kesepakatan ini memunculkan niat untuk bisa menciptakan kemakmuran serta menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara Negara-negara anggota. Caranya, dengan peningkatan kerjasama ekonomi seperti perdagangan dan investasi. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Pasti akan ada yang kalah dan menang, walaupun mungkin saja hanya sementara waktu. Dengan gap yang menganga lebar antara perekonomian China dengan Negara anggota ASEAN, tentu saja pasti pihak yang lebih lemah yang dirugikan.

Peluang memperluas pasar dan meningkatkan ekspor ke China tetap terbuka, namun tak seimbang dengan kecepatan arus impor produk-produk China. Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap impor produk bahan baku industri dari China tidak kecil. Pengusaha bordir Tasikmalaya berusaha mencari terobosan dengan melakukan efisiensi untuk meningkatkan daya saing produk bordir yang dipasarka. Langkah itu, sebagai bagian untuk menghadapi masuknya pasar bordir asal China yang diperkirakan akan semakin deras, menyusul dibukanya berpadagangan pasar bebas di kawasan ASEAN- China.

Dalam tiga tahun terakhir bordir China sudah menekan pengusaha Tasikmalaya, terutama di pakaian wanita dan baju koko. Pakaian China itu harganya murah, sehingga mempengaruhi penjualan produk bordir Tasikmalaya, sedang untuk produk mukena, masih bisa bersaing. Sehingga sekarang para

---

<sup>13</sup> [produk-china-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya.htm](#)

pengusaha bordir berusaha mengembangkan mukena dengan sistem komputerisasi.

Masuknya sistem komputerisasi untuk produk mukena, ternyata bisa menekan biaya produksi menjadi murah dan bisa bersaing dengan produk China. Proses tersebut akan semakin besar, karena cara itu dianggap lebih murah. Para pengusaha bordir sendiri terus berusaha melakukan kajian, dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China. Kajian itu, terutama melakukan evaluasi setiap bulan, atau dengan kemunculan produk China. Pengusaha Tasikmalaya tidak ingin mereka hancur, ketika produk-produk China membanjiri pasar domestik.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap strategi perusahaan kerajinan bordir Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang kerjasama ASEAN- China Free Trade Area
2. Bagaimana peluang dan ancaman Indonesia dengan diberlakukannya ACFTA?
3. Bagaimana strategi pemerintah dan pengusaha bordir Indonesia khususnya Tasikmalaya dengan diberlakukannya ACFTA?

## 1. Pembatasan masalah

Karena begitu luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk membatasi masalah dengan menitikberatkan penelitian kepada kerjasama ASEAN-China Free Trade Area terhadap perusahaan-perusahaan kerajinan kain bordir di Tasikmalaya serta strategi dari perusahaan-perusahaan bordir itu sendiri.

## 2. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah penganalisaan bagi penulis dalam melakukan pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Sejauhmana ancaman produk-produk China masuk ke Indonesia dan strategi UMKM bordir Tasikmalaya dalam menyikapi banjirnya produk China tersebut?”**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Dalam meneliti sebuah permasalahan, tentunya harus memiliki tujuan yang terarah agar penelitian tidak melebar. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Berikut tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui latar belakang dari kerjasama ASEAN- China Free Trade Area.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan para pengusaha kerajinan bordir Tasikmalaya terhadap diberlakukannya ACFTA.
- c. Untuk menganalisa dampak dari ACFTA terhadap perusahaan-perusahaan kerajinan bordir di Tasikmalaya.

## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang mendalam dan sebagai bahan data informasi bagi perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Ilmu Hubungan Internasional
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak yang terkait dan penulis sendiri dalam bidang penelitian sebagai pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **1. Kerangka Teoritis**

Demi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis dalam kerangka teoritis ini, penulis mengemukakan beberapa teori dari para pakar Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dasar

pemikiran yang kuat yang selanjutnya dijadikan acuan pengambilan kesimpulan sementara yaitu Hipotesis.

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian, penulis mengacu pada teori dan konsep dari para ahli Hubungan Internasional, seperti yang disampaikan oleh **K.J Holsti** dalam bukunya “Politik Internasional: suatu kerangka analisis” menjelaskan bahwa Hubungan Internasional sebagai berikut:

”Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat Negara-negara, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara di Dunia”<sup>14</sup>

Adapun definisi Hubungan Internasional yang dikemukakan oleh **Peter A. Tomma** dan **Robert Garman** sebagai berikut:

”Studi hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Aktor dari interaksi ini menurut pendekatan realism hanya Negara, namun menurut pendekatan pluralisme aktornya tidak hanya Negara tetapi juga ada aktor diluar Negara seperti Organisasi Internasional, perusahaan-perusahaan multinasional lainnya”.<sup>15</sup>

Karena ACFTA di lakukan oleh dua kawasan yang berbeda, maka guna membantu penelitian ini dibutuhkan teori regional/ kawasan. **Andrew Hurrell** dalam “*Regionalism in Theoretical Perspective*” mendefinisikan regional bahwa:

”Suatu region/ kawasan tidak hanya didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kesamaan letak geografis, melainkan lebih kepada bagaimana aktor-aktor politik

---

<sup>14</sup> K.J.Holsti, *Politik Internasional: Suatu kerangka analisis* ( Bandung: Bina Cipta, 1992). Hlm 27

<sup>15</sup> Peter A. Tomma and Robert Garman, *International Relations: Understanding Global Issues*, Broke, Coole Publishing Company, 1990. Hlm 59-60

**internasional menginterpretasikan makna dari region itu sendiri”.**<sup>16</sup>

Fenomena ekonomi politik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan serta selalu erat hubungannya dengan setiap interaksi global. Hubungan tersebut saling berkaitan antara aktor internasional yaitu Negara dan Pasar. Proses interaksi suatu Negara dengan Negara lain dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari faktor politis.

Untuk membantu mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi internasional. Menurut **Dominick Salvatore** yang diterjemahkan **Rudi Sitompul** dalam bukunya “Ekonomi Internasional” sebagai berikut:

**“Ekonomi Internasional adalah suatu aktifitas dari ekonomi yang ditimbulkan oleh keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintas batas-batas Negara dan bersifat internasional”.**<sup>17</sup>

Dalam mengkaji sistem ekonomi pada perjanjian ACFTA, maka sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem integrasi ekonomi regional. Sistem tersebut berusaha mengurangi hambatan-hambatan pada perdagangan lintas batas antar negara dan bahkan dihilangkan. **Frankel** dan **Jeffrey** dalam integrasi ekonomi regional menyebutkan bahwa:

**“Dimana beberapa ekonomi dalam suatu wilayah bersepakat untuk menghapus hambatan dan mempermudah arus lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja. Pengurangan bahkan penghapusan tarif dan hambatan non tarif akan mempercepat terjadinya integrasi**

---

<sup>16</sup> Andrew Hurrell. *Regionalism in Theoretical Perspective*, dalam Louise Fawcett dan Andrew Hurrell (ed), *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order* (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 41

<sup>17</sup> Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: BPFE, 1985), Hlm.5

**ekonomi regional seiring lancarnya lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja tersebut.”<sup>18</sup>**

Implementasi dari ekonomi internasional maupun regional tersebut melahirkan paradigma di suatu negara, yakni pola kerja sama internasional. Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama dibidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya dan ekonomi yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, kerjasama internasional yang ditekankan adalah berkenaan dengan perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) dan dampaknya terhadap ekspor produksi kerajinan Bordir Tasikmalaya. ACFTA sendiri merupakan wujud dari suatu integrasi ekonomi pada tingkat regional.

Pada dasarnya pasar bebas merupakan bagian dari paket liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi selain berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam sektor ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar. Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan.

Dalam perdagangan bebas suatu negara akan diuntungkan apabila negara tersebut memiliki keunggulan komperatif. Seperti yang dijelaskan dalam teori

---

<sup>18</sup> Frankel, Jeffrey (1997): Regional Trading Blocs in The World Economic System, NBER Working Paper Series 4050

<sup>19</sup> Kerjasama internasional: [http://id.wikipedia.org/wiki/Kerja\\_sama\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama_internasional)

“Comparative Advantage” (keunggulan komparatif) karya **David Ricardo** yang mengatakan bahwa:

“dalam mekanisme pasar bebas, suatu negara akan diuntungkan apabila mampu memproduksi barang dan jasa dalam kuota massif, namun dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara saingannya, serta mampu membuat spesialisasi, dengan memproduksi komoditas unggulan yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain”.<sup>20</sup>

Dengan diberlakukannya ACFTA, tentu saja hal ini akan menimbulkan efek terhadap negara bersangkutan yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan demikian, setiap negara diharapkan memiliki strategi dalam menghadapinya, strategi berguna agar sasaran suatu negara tercapai dan sesuai dengan tujuan nasional. Langkah yang digunakan dalam mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional.

Untuk mengatasi suatu persoalan perekonomian nasional suatu Negara guna memenuhi kepentingan nasional maka Negara itu akan menetapkan strategi untuk menanggulangi masalah ekonomi internasionalnya. Dengan demikian dikemukakan definisi strategi oleh **Oman Heryaman** dan **Ade Priangani**:

”strategi secara umum adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian hari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.”<sup>21</sup>

Adapun definisi lain mengenai strategi oleh **Bintoro Tjokroaminoto** sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> David Ricardo, *Principles of political economy and taxation: Comparative Advantage*. 1817

<sup>21</sup> Oman Heryaman dan Ade Priangani, *kajian strategis dalam dinamika hubungan luar negeri Indonesia* (Bandung: Fisip Universitas Pasundan, 2003), Hlm 1

**“Strategi adalah keseluruhan (kebijakab-kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai tujuan dan untuk mengatasi suatu persoalan”.** <sup>22</sup>

Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui 4 tahap, yakni: *Pertama* Tahap perumusan: Perebutan intelek; *kedua*, Tahap pemutusan: Perbuatan politis; *ketiga*, Tahap pelaksanaan: Perbuatan Teknis; *keempat*, Tahap penilaian: Perbuatan intelektual.

Pertumbuhan ekonomi China saat ini sangat cepat yang terus meningkat dari tahun ke tahun karena didukung adanya kebijakan negaranya terhadap perbaikan infrastruktur dan adanya kebijakan “*open door policy*” yang berarti negara lain bebas dalam melakukan kerjasama. Seperti yang dikatakan oleh **Faisal Basri** yaitu:

**“pertumbuhan ekonomi China sangat cepat dan lebih sustainable, pertumbuhan investasi China lebih tinggi karena didukung oleh infrastruktur yang baik membangun jalan yang mulus ke pelabuhan dan sumber daya manusia yang baik, dan banyak fasilitas lainnya, selain itu juga didukung oleh kebijakan “open door policy”.** <sup>23</sup>

Indonesia harus punya strategi khusus untuk meningkatkan daya saing produk-produk domestik dalam menghadapi produk-produk China, seperti yang dikatakan Menteri Perdagangan **Mari Elka Pangestu**:

**”dalam menghadapi ACFTA salah satu langkah utama itu adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang dilakukan melalui lintas sektoral, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta organisasi para pengusaha Nasional,. Selain itu, Pemerintah juga akan memberlakukan pengamanan produk dalam negeri guna menghindari praktek perdagangan yang tidak adil dan sehat ( unfair trade) yakni safeguard”.** <sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Bintoro Tjokroaminoto. *Teori dan Pembangunan Strategi* (Yogyakarta:BPPE, 1996)

<sup>23</sup> Faisal Basri, Indonesia bisa memanfaatkan peluang di China dan India, tempo Jakarta 23 januari 2007

<sup>24</sup> M. Firmansyah, *Dilema Implementasi C-AFTA*:  
<http://www.suarantb.com/2011/04/26/redaksi/indeks.html>

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemerintah Indonesia melakukan proses ratifikasi perjanjian investasi dalam kerangka pasar bebas ASEAN-China (ACFTA). Sebagai kelanjutan dari perjanjian kerja sama bidang penanaman modal ASEAN dan China. Perjanjian kerjasama investasi tersebut ditandatangani pada 15 Agustus 2009 yang mencakup masalah promosi, proteksi dan fasilitasi penanaman modal, tapi tidak termasuk liberalisasi di bidang penanaman modal.

Pasca ratifikasi pasar domestik Indonesia mulai didera kompetisi yang sengit dengan China. Sebagai bukti, produk-produk China sangat mendominasi di pasar lokal dibandingkan dengan produk-produk Indonesia, salah satu penyebabnya dikarenakan kualitas dan kuantitas produk China lebih unggul dari produk Indonesia.

Untuk persiapan perdagangan bebas dengan Asia Tenggara saja, China ini sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sejak delapan sampai sepuluh tahun yang lalu. Persiapan ini memang tidak sebanding dengan Indonesia yang baru mempersiapkan persaingan pasar bebas dalam waktu beberapa bulan saja.<sup>25</sup>

Adapun asumsi menurut peneliti adalah sebagai berikut;

- a. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang. Sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

---

<sup>25</sup> Seputar Indonesia: Tetap optimis hadapi produk China

- b. Dengan terbukanya luasnya pasar China dimana hampir 80% tarif yang menggunakan skema ACFTA telah mencapai *zero percent* hal ini menjadi peluang baik bagi pasar produk Indonesia ke China, adapun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia karena produk-produk China lebih kompetitif dalam persaingan, mereka telah mempersiapkannya 5-10 tahun sebelumnya sedangkan Indonesia hanya beberapa bulan sebelum mulai diberlakukannya ACFTA.
- c. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan memotong pajak industri dalam negeri, memerangi pungutan liar, memberikan bantuan subsidi, serta harus mendorong gerakan cinta produk dalam negeri. Sementara strategi para pengusaha bordir dengan meningkatkan kualitas, mengkampanyekan cinta produk lokal, meningkatkan daya saing harga, promosi pemasaran dan mencari berbagai inovasi motif.

## 2. Hipotesis

Dengan mengacu pada perumusan masalah dan kerangka teoritis di atas penulis menarik Hipotesis sebagai berikut **“Jika ancaman banjirnya produk China di Indonesia dapat disiasati oleh UMKM bordir Tasikmalaya dengan cara meningkatkan kualitas produk bordir Tasikmalaya maka akan mampu bersaing dengan produk China”**.

### 3. Operasional Variabel dan Indikator

**Tabel 1**

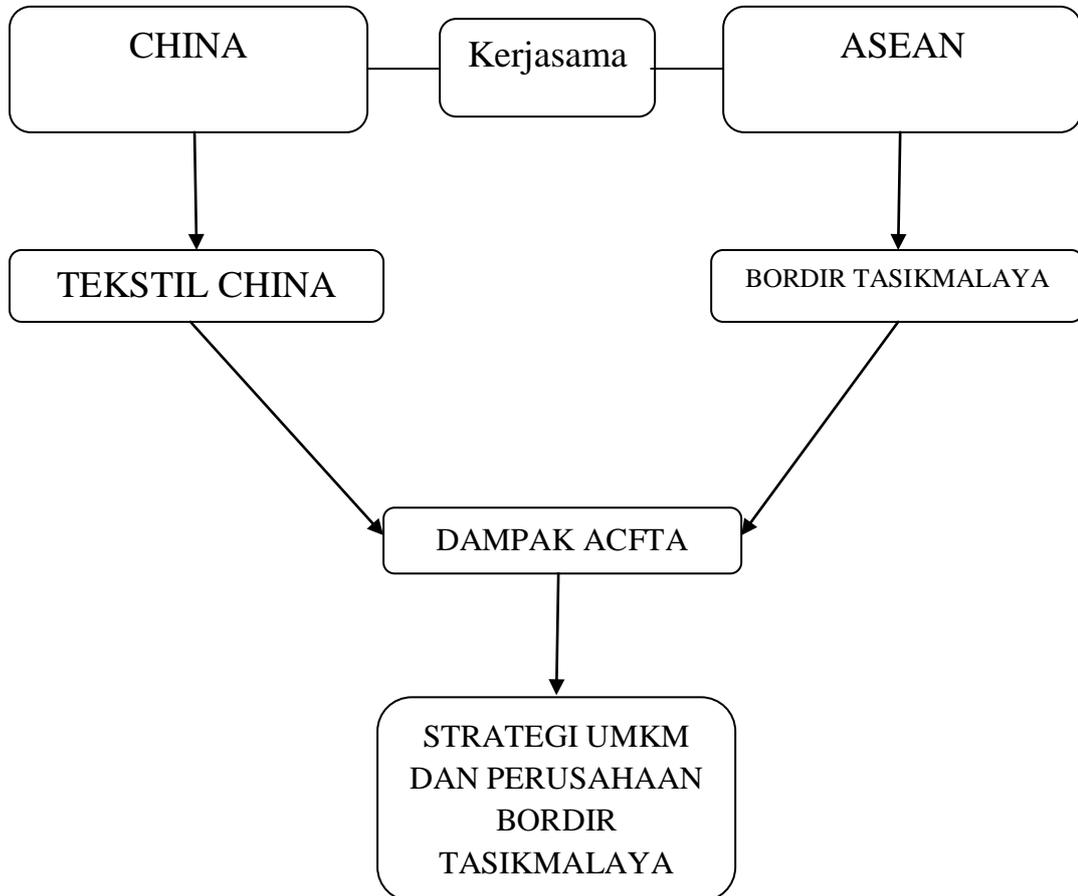
**Tabel Operasional Variabel**

<b>Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Verifikasi (Analisis Data)</b>
<p><b>Variable Bebas:</b> Banjirnya produk China di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membanjirnya produk-produk China di pasaran</li> <li>2. Produk China menindas produk lokal dari segi harga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2008 impor produk China mengambil alih 70% pangsa pasar domestik yang semula dikuasai UMKM</li> <li>2. Harga produk China lebih murah dari produk lokal</li> </ol>
<p><b>Variable Terikat:</b> Strategi peningkatan kualitas produk oleh pengusaha kerajinan bordir Tasikmalaya dalam menghadapi produk-produk China</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkampanyekan Cinta Produk Lokal</li> <li>2. Pengamanan pasar dan produk Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya penggunaan produk dalam negeri, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi penggunaan produk dalam negeri</li> <li>b. Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produk dalam negeri (Inpres No.2 tahun 2009)</li> <li>c. Menggalakan program 100% Cinta Indonesia dan Industri Kreatif</li> </ol> <p>(<a href="http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setdijen/Buletin2010/Full02.pdf">http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setdijen/Buletin2010/Full02.pdf</a>)</p> </li> <li>2. Upaya pengamanan pasar domestik meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peredaran barang dipasar lokal</li> <li>b. <i>Task Force</i> pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan adanya ketentuan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>perlindungan konsumen dan industri.</p> <p>c. Kewajiban penggunaan <i>label</i> dan manual berbahasa Indonesia</p> <p>(<a href="http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setdijen/Buletin2010/Full02.pdf">http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Setdijen/Buletin2010/Full02.pdf</a>)</p>
--	--	--

#### 4. Skema Kerangka Teoritis

Gambar. 1



## **E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini, kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasikan, menelaah, serta menganalisa fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat actual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, web, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

## **F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Berdasarkan judul yang di ambil, maka penulis melakukan penelitian di:

1. Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah No.17 Bandung

2. DPRD Kota Tasikmalaya

Jl. RE. Martadinata No. 334 Indihiang, Kota Tasikmalaya

3. Gabungan Pengusaha Bordir Tasikmalaya (GAPEBTA)

Jl. Perintis Kemerdekaan. Tasikmalaya

4. Dinas Koperasi UMKM dan Indag Kota Tasikmalaya

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Tlp. (0265) 342571

5. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat (10110)

Tlp: 3841248 – 3848272 – 3849801 – 3844584

6. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Jl. P.H.Hasan Mustofa No. 43 (022) 7272595-7201696 Bandung 40124

## **2. Lamanya penelitian**

Lamanya penelitian yang dilakukan penulis adalah kurang lebih lima bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Mei 2012.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan garis besar masalah yang akan diteliti, berikut adalah uraian tersebut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)**

Berisi tentang hubungan China dengan Negara-negara ASEAN dalam konteks perdagangan bebas pasca ratifikasi ACFTA serta implementasinya.

## **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI UMKM di TASIKMALAYA**

Berisi tentang berbagai hal mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya khususnya kerajinan industri bordir.

## **BAB IV STRATEGI PERUSAHAAN KERAJINAN BORDIR TERHADAP ANCAMAN ACFTA**

Bab ini menjelaskan mengenai peluang dan penerapan strategi dari perusahaan bordir di Tasikmalaya menghadapi produk-produk dari China setelah berlakunya perdagangan bebas ASEAN-China

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang singkat, jelas dan informatif serta pengujian terhadap hipotesis.